

PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH
(Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara)



REKA MARSELA
NPM 1421020208

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)

FAKULTAS SYIARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M

PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH

(Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah

Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

REKA MARSELA

NPM: 1421020208

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag,

Pembimbing II: Eko Hidayat, S. Sos., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan Desa di laksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat Desa. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut berkerja sama dalam pembangunan itu sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya Kec.Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara, dan Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Otonomi Desa di Desanegeri Campang Jaya apakah sudah berdasarkan atas tujuan Undang-Undangotonomi desa dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan otonomi desa di Desa Negeri Campang Jaya sudahberjalan di atas kemaslahatan umat atau masyarakat secara fiqih siyasah.

Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif analisis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menapsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulandari proses tersebut. Analisi data yang di peroleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analisi data dan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Desa Negeri Campang Jaya secara umum belum cukup baik dalam hal ini dapat dilihat dari keterkurangannya sarana sosial (klinik) atau dalam mengakses kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Desa Negeri Campang Jaya telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahuns 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan sedangkan masyarakat desa sangat membutuhkan program kerja atau mekanisme yang diperkerjakan dapat sesuai dengan harapan, namun pada kenyataannya masih saja ada yang belem terealisasikan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Di antara tugas dan kewajiban pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya juga harus menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam fiqih siyasah, tugas terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Negeri Campang Jaya.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

M. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan mem berikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : **Reka Marsela**
NPM : 1421020208
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT
FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Negeri Campang
Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara).

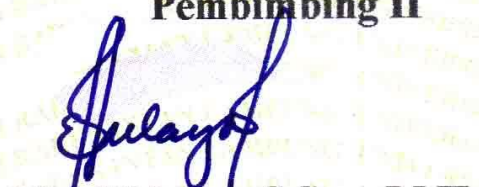
MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.
NIP.195607271988031001

Pembimbing II


Eko Hidayat, S.Sos., M.H
NIP.197509302003121002

Mengetahui

**Ketua jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iiyyah)**


Drs. Susiadi AS., M. Sos. I
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH** (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara) disusun oleh Reka Marsela, NPM.1421020208, Program Study : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 4 Juli 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.



DEKAN

Dr. Mansyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: ”hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taati Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri, (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian , jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa’ Ayat 59:(4)).¹



¹ Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 59:(4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
2. Umasin dan Pelita Wati sebagai abi dan mamaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada terhenti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lautan do'a, dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
3. Ayundaku tersayang Meri Yana (gen Meyi)
4. Kakanda iparku tersayang Doni Damara (kunjung)
5. Adikku tersayang Aan Satriyawan (Sep)
6. Keponakanku tersayang Ceisya Canzul Arrazy (Rujungan)
7. Keluarga besarku tersayang
8. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Reka Marsela, lahir pada tanggal 05 Februari 1995 di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara. Anak kedua dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Umasin dan Ibu Pelita Wati.

Pendidikan yang pernah di tempuh

1. SDN 01 Negeri Campang Jaya (Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara) lulus tahun 2008
 2. MTS Al-Ma'arif Batu nangkop (Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara) lulus tahun 2011
 3. MAN 02 Lampung Utara (Kecamatan Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara) lulus tahun 2014
 4. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sekarang telah bertrasnsisi menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
- 

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang , pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara)”**. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah.
4. Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.

5. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu sahabat seperjuangan keluarga besar Siyasah'A angkatan'14, wabil khusus untuk para pejuang S.H, yaitu: Risti Yuli Prawesti, S.H., Nabila Puspita, S.H., Meila Iskatrilia, S.H.,Rena Septiyana, S.H., dan Vera Agus Indriyani, S.H.,
9. Untuk ncist saya (Renza Viona) yang selalau ada setiap saat
10. Untuk Ikbal Rahmatullah yang selalu mendukung dan memotivasi meskipun dari jarak yang jauh
11. Untuk kakak (Andeti Nabela) yang selalu memberi semangat dan motivasi
12. Keluarga besar pakmuda Lukmansyah yang selalu memotivasi.
13. Keluarga besar abi Anwar yang selalu memberikan nilai-nilai positif
14. Keluarga besar paman Arsan yang menjadi tempat tinggal
15. Keluarga besar KKN 24 Dusun Umbul Bandung, Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan. yang telah menemani selama 40 hari
16. Keluarga besar PPS Pengadilan Agama Metro
17. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, 29 Juni 2018
Penulis

Reka Marsela

NPM.1421020208



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Fiqih Siyasa.....	18
1. Pengertian Fiqih Siyasa.....	18
2. Macam-Macam Fiqih Siyasa.....	22
B. Siyasa Dusturiyah	24
C. Pemerintahan Desa	47
1. Pengertian Pemerintahan Desa	47
2. Perangkat Desa	51

D. Otonomi Desa	65
1. Pelaksanaan Otonomi Desa	65
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Desa	69

BAB III PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA NEGERI CAMPANG JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
1. Keadaan Geografis	70
2. Keadaan Demografis	70
3. Sarana dan Prasarana Desa.....	72
B. Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya	76

BAB IV PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA NEGERI CAMPANG JAYA

A. Pelaksanaan Otonomi Desa pada Pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya	79
B. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya	81

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari dari kekeliruan bagi pembaca dalam judul skripsi ini, maka perlu ada penegasan judul karena pemahaman yang salah maka akan salah pula pemahaman terhadap isinya. Oleh karena itu adanya pembahasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan makna yang dimaksud, maka akan diuraikan secara terinci yang terdapat pada judul skripsi ini **“PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara)”**. Maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini antara lain:

1. Pelaksanaan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan, (rancangan, keputusan)²
2. Otonomi adalah, Pemerintahan sendiri; -daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³
3. Desa adalah, a. kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa),

²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997, hlm.554

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm 805

- b. kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, belum ada listrik, c. udik atau dusun (daerah pedalaman sebagai lawan kota); ia hidup tenteram di, terpencil di kaki gunung, 4 kl tanah: tempat; daerah: ⁴
4. Fiqih Siyasa adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah “pelaksanaan otonomi desa menurut Fiqih siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara)”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari pelaksanaan otonomi desa menurut fiqih siyasah adalah proses pemerintahan yang berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihuni oleh sejumlah keluarga, dikepalai oleh seorang kepala desa, yang berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hlm, 256

⁵A. Dijazuli. *fiqih Siyasah*, Prenada Media, Jakarta. 2000, hlm.42

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec.Sungkai TengahKab. Lampung Utara) adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana pelaksanaan otonomi desa menurut fiqih siyasah di Desa Negeri Campang Jaya.

2. Secara Subyektif

Pelaksanaan otonomi desa pada desa negeri campang jaya belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqih Siyasah Islam.Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang ada di masyarakat desa tidak berjalan dengan semsetinya.Permasalahan ini belum ada yang membahas khususnya di fakultas Syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG, selain itu sebagai syarat penulis menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah).

C. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan

kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenangan mengurus dan mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penetapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada dipemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah ditetapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan Negara, agama hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan Negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintah daerah juga sebagai training ground dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan Negara. Sistem pemerintah daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada dipemerintahan pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberipelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan

dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan rakyat.⁶

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul dan adat istiadat Desa dan menurut Pasal 19 kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;

⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi atau, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyempatkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁸

Pertimbangan peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam Implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan.⁹ Adapun dalam tahapan penyaluran dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,

⁷Dr. Hj. Zuhraini. SH.,MH, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung:2016), h.235

⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

telah ditetapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁰ Dan terakhir di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara¹¹

Pelaksanaan Otonomi Desa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah cukup baik, hal ini dapat di lihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antar aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur, hanya saja dalam mewujudkan dan menjalankan pelaksanaan nya masih kurang berjalan, yang demikian itu membuat pelaksanaan pembangunan ataupun pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya menjadi tertinggal dan tidak berkembang dan tidak berjalan diatas prinsip-prinsip pembangunan Infrastruktur pembangunan Desa yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang sangat membutuhkan sarana dan prasarana Desa yang dapat berjalan dengan semestinya.

Sarana dan prasarana di Desa Negeri Campang Sudah cukup memadai sudah ada masjid, pos-pos keamanan, dan sarana prasarana lainnya, akan tetapi tidak terlaksana karena kurangnya kesadaran pada masyarakat Desa dan aparatur Desa untuk bersama-sama mewujudkan dan menjalankan Pelaksanaan Otonomi Desa pada Desa Negeri Campang Jaya. Begitu juga dengan perbaikan jalan dan perbaikan gorong-gorong pun sudah ada yang di perbaiki dan berjalan namun

¹⁰Undang Nomor 22 Tahun 2015 revisi atas Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

¹¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 Perubahan kedua Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

tidak semua jalan dan gorong-gorong yang di perbaiki. Oleh karena itu di harapkan aparaturnya dan perangkat Desa dapat menjalankan pelaksanaannya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Pelaksanaan Otonomi Desa itu sendiri seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa. khususnya di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah.

Dalam fiqh Siyasah, sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah SAW., yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW., sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama fiqh telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqh Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqh dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.¹²

¹²Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag *Fiqh Siyasah* (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Pendekatan 2014), hlm 61-63

Dalam pelaksanaannya, beberapa desa telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sampai saat ini. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW, beliau bersabda:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya menerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Sekiranya dia menyuruh supaya bertaqwa kepada Allah dan berlaku adil maka dia akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti dia akan menrima akibatnya (HR. Bukhari Muslim).¹³

Oleh karena itu, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa di dasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian keadilan harus di wujudkan oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja.

¹³ Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim : Hadist yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (Cet, 1; Bandung: Jabal, 2008), h. 344

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pelaksanaan otonomi desa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya Kec.Sungkai Tengah Kab.Lampung Utara pada hal-hal tertentu seperti; dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, berdasarkan hasil penelitian yang di dapati bahwa pelaksanaan otonomi desa tersebut sudah di salurkan dengan cukup baik kepada masyarakat yang berhak yang menerimanya. Ini berarti bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahannya Kepala Desa beserta penrangkatnya sudah berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat.

Di antara tugas dan kewajiban pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya juga harus menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam fiqih siyasah, tugas terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Negeri Campang Jaya

Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparatur Desa Negeri Campang Jaya harus mempunyai kekuatan dan charisma serta berwibawa. Membela yang

lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah.

Dalam Negara islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, sunnatullah, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.¹⁴

Dengan adanya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan Judul penelitian **“Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai tengah Kab. Lampung Utara.”**

D. Rumusan Masalah.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara ?
2. Bagaiman pandangan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara ?

¹⁴Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haikal*, (jakarta: Paramadina, 2001), h.2.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Otonomi Desa di Desa negeri campang jaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimanapelaksaaan otonomi desa di desa negeri campang jaya menurut fiqih siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapatkangelar sarjana S-1 di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan Ilmu yang telah diperoleh selama ini dibangku kuliah dalam praktek yang terjadi dilampanagan.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparaturn Pemerintah Desa Negeri Camapang Jaya dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek fiqih siyasah
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya yang juga berminat untuk meneliti dalam bidang yang sama.

F. Metode penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”¹⁵

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.”¹⁶

¹⁵Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta : Paradigma, 2005) h.58.

¹⁶ Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian* (Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008) h.24

2. Populasi dan Sample

- a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian¹⁷

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintahan desa seperti, Kepala Desa, Sekdes BPD, Bendahara, Kadus dan perangkat Desa lainnya, masyarakat Desa Negeri Campang Jaya seperti Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, dan Masyarakat Desa lainnya.

- b. Sample, sample yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik sampling dimana dari perangkat pemerintahan desa yang menjadi sample adalah 15 orang dari perangkat desa dan masyarakat desa yaitu, 1 Kepala Desa, 4 orang Perangkat Desa, 1 orang tokoh agama 1 orang Tokoh Masyarakat, dan 8 orang masyarakat Desa.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer ialah “data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

¹⁷Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2010) h.147.

¹⁸Juliansyah, *Op-Cit*, h.155

bersangkutan yang memerlukan”¹⁹Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Negeri Campang Jaya kecamatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.”²⁰

c. Alat Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.²¹Interview ditunjukan kepada Kepala Desa, Masyarakat dan Paratur-aparatur Desa Negeri Campang Jaya.

¹⁹Iqbal Hasan, *Pokok-poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002 h.82

²⁰*Ibid.* h. 58.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rieneka Cipta 2006), hlm 72

2) Observasi

Observasi, adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Anailis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisi kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu “menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif. Yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.²²

²²Soerjino soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986) h.112

BAB II

PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.²³

a. Fiqih

Kata Fiqih berasal dari *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian Fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” di ungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*) fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut

²³Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqih Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga 2008), h. 2-15

istilah fiqh adalah: *Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)*²⁴.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk mengambil hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-alhkam al-dualiyah* (hubungan internasional). Pada bagian ini mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan di uraikan secara lebih perinci.²⁵

²⁴Dr. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisai Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), h.2

²⁵*Ibid*, h.3

b. Siyasah

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahat serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah “mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahata.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa relijius di kemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak di tetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga di rumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang di berikan kepadanya. Dari gambaran di atas bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan di rumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁶

²⁶*Ibid.* Muhammad Iqbal h. 4-5

2. Macam-Macam Fiqih Siyasah

a. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahka ada sebagian ulama yang menetapkan delapan bidang, namaun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah *siyasah dusturiyyah*, peraturan perundang-undangan *siyasah maliyyah*, ekonomi dan moeter *siyasah qadha'iyyah*, peradilan *siyasah harbiyyah*, hukum perang dan *siyasah idariyyah* administrasi Negara. Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, *siyasah qadha'iyyah* peradilan, *siyasah idariyyah* administrasi Negara, *siyasah maliyyah* ekonomi dan moneter, dan *siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah* hubungan internasional. Sementara itu Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasioanal dan keuangan Negara.²⁷

²⁷*Ibid.* Muhammad Iqbal h.14

Berbeda dengan tiga pikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khariyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksana Perundang-undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Perperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok antara lain:

- 1) Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga Legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau Eksekutif.
- 2) Politik Luar Negeri (*Siyasah dauliyyah/siyasah khariyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dengan yang Non Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-*

dualial-khashs), atau di sebut juga dengan hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatic antara Negara Muslim dengan Negara Non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*), atau di sebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual-beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang yang dilakukan warga Negara Muslim dengan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengtaur antarlain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar di izinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- 3) Politik Keuangan dan Moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara , pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak politik, pajak dan perbankan.²⁸

B. Siyasah Dusturiyah

Dari beberapa penjelasan di atas sistem pemerintahan ini termasuk dalam konteks *siyasah dusturiyah*, yaitu hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka

²⁸*Ibid.* Muhammad Iqbal h.16.

demikian demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah*, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

Ini mengibaratkan bahwa kepala Negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karena kepala Negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu kepala Negara harus menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia manusia suci yang berbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang kepala Negara setelah Rasulullah SAW wafat, di perintahkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khaththab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadim al-ummah* (pelayan umat) yang mengatur mengurus kepentingan umat.

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa kepala Negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala Negara

tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala Negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala Negara dapat dikenai pidana atas kejahatan yang dilakukannya, dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.²⁹

Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Menurut Al-Mawardi dalam karyanya yang *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala Negara yaitu:

- 1) Memelihara Agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.
- 2) Menjalankan hukum-hukum di antara orang-orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
- 3) Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
- 4) Mengetahui *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.

²⁹*Ibid.* Muhammad Iqbal h. 241

- 5) Memperkuat pertahanan keamanan Negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
- 6) Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
- 7) Mengelola keuangan Negara seperti *ghanima*, *al-fai*, pajak dan sedekah lainnya.
- 8) Menentukan belanja Negara (APBN).
- 9) Mengangkat pejabat-pejabat Negara berdasarkan kejujuran keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
- 10) Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian umat hidup dengan kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.³⁰

Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas-tugas kepala Negara hanya dalam empat bidang saja yaitu:

- 1) Mengembangkan dakwah islam dan menegakkan kebenaran
- 2) Menegakkan keadilan
- 3) Melindungi agama dari para pengacau dan menolak *bid'ah*
- 4) Bermusyawarah dalam menegakkan hukum-hukum yang tidak di atur secara tegas oleh *nashsh*.

Sementara Muhammad Yusuf Musa merangkum tugas kepala Negara secara garis besar hanya dua saja, yaitu (1) melaksanakan dan memelihara agama dan (2) meluruskan orang-orang yang menyimpang dari

³⁰ *Ibid.* Muhammad Iqbal h.243

agama. Hampir sejalan dengan pendapat ini A. Hasymi juga menyebutkan dua kewajiban pokok kepala Negara yaitu, (1) menegakkan Islam dan (2) menyelenggarakan urusan-urusan kenegaraan secara umum dalam batasan-batasan ajaran Islam. Tugas dan kewajiban ini meliputi keharusan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam politik Islam istilah pemimpin di kenal dengan sebutan *khalifah*, *imam* dan *amir* dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya. Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *Khalifah*, *imam* atau *amir* tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Walikota. Karena *Khalifah*, *imam* atau *amir* pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka sebagai pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama. Dalam surat *An-Nisa'* ayat 59, (4) Allah SWT, berfirman.

أَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُم مَّا يَأْتِيهِمُ مِنَ اللَّهِ إِلَىٰ فَرْدٍ وَهُوَ شَيْءٌ فِي تَنَزُّعَاتِهِمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَلَّا مَرُؤًا إِلَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ بِاللَّهِ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرًا وَلْيَوْمٍ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taati Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri, (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."³¹

³¹Qur'an Surat *An-Nisa'* Ayat 59 (4)

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa umat membutuhkan pemimpin, baik masyarakat kecil, apalagi masyarakat besar, karena dengan adanya pemimpin, umat akan lebih teratur dan menjadi baik, sebaliknya tanpa pemimpin akan terjadinya keresahan, kekacauan dan kehancuran. Oleh sebab itu Islam selalu membimbing pemeluknya agar hidup bersama pemimpin, misalnya imam shalat, imam safar, amil zakat, pemimpin haji, pemimpin rumah tangga, pemimpin perang dan Negara. Ayat ini mengandung prinsip dan tatanan kehidupan berkeluarga dan bernegara menuju kebaikan umat di dunia dan di akhirtanya. Adapun hadis yang menegaskan bahwa setelah pemimpin telah melakukan kewajibannya menjadi seorang pemimpin maka umat pun memiliki kewajiban untuk mentaati pemimpin, dari sahabat Nabi.

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar, selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah SWT., maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin yang baik dan sukses adalah pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakat (bawahan) nya. Pemimpin sering disebut *Khadimul Ummah*, (pelayan umat). Banyak pemimpin islam yang dapat di jadikan contoh untuk di terapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan permasalahan yang di hadapi oleh pemimpin zaman pemerintahan Islam (*khulafaur Rasyidin*). Diantara pemimpin Islam yang pernah membuat kejayaan pada masanya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq Umar bin Khattab,

Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya.³²

حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَطَاكَ اللَّهُ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَا اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ عَطَاَنِي مَنْ عَصَا أَمِيرٍ فَقَدْ عَصَانِي. (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ)

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda: “ *barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang Siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, dan barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku*”.
(HR Bukhari Muslim).³³

1. Konsep-Konsep Penting Dalam Sejarah Pemerintahan Islam

a. Imamah

Dalam wacana fiqih siyasah kata *imamah*, (imamah) biasanya di identikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami Imamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa Imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran Agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminology imamah untuk pembahasan tentang Khilafah. Hal ini antarlain dilakukan oleh Abu Al-Hasan Al-Mawardi. Di antara pemikir Sunni modern juga ada yang menggunakan terminology *Al-Imamah Al-Uzhma*.

³²M. dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta:Gema Insani Pers)., 2001, h 276

³³Al-Ahkam, *Shahih Bukhari Muslim : Hadist yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*.

Penegakkan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batasan-batasan yang di gariskan Islam. Menurut Al-Mawardi imamah di butuhkan untuk mengantkan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatrur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan Al-Mawardi, Audah mendefinisikan bahwa Khilafah atau Imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam maslah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib di laksanakan oleh segenap umat Islam.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW, mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasar kan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi utama otomatis berakhir dan tidak dapat di lanjutkan lagi oleh siapapun, sebab beliau adalah penutup para Rasul. Maka tinggalah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau. Karena orang yang menggantikannya (Abu Bakar) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia di namakan dengan *Khalifah*, (*Khalifah Rasul Allah* = Pengganti Rasulallah). Dalam pandangan Islam antara fungsi religious dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat di pisahkan. Antar keduanya

³⁴H.A. Djazuli. *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2003), h.54-63

terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam pandangan ini begitu kental hingga abad ke-20. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan Negara sekaligus, sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*al-Islam di wa-dawlah*). Barulah ketika kekhalifahan Turki Utsmani melemah dan di hancurkan oleh Musthafa Kemal Ataturk (1924) timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam dunia Islam. Ataturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan Turki modern.³⁵

b. Teori kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah

Kata kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah yaitu Imamah yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur kemaslahatan hidup. sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat seorang kepemimpinan adalah berdasarkan akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.³⁶

Dalam mempelajari Fiqih Siyasah ada beberapa metode yang di pergunakan sebagai acuan, di antaranya ialah:

1. Metode Ijtihad
2. Pendekatan Qiyas

³⁵ *Op-Cit.* h. Muhammad Iqbal 150-151

³⁶ Al-Mawardi. *Al-Ahkam Sulthaniyah- Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Pers, 2015). H.9.

3. Pendekatan Ijma'
4. Pendekatan Istihsan
5. Pendekatan Maslahah Mursalah
6. Pendekatan Istihhab
7. Pendekatan Urf (hukum adat)³⁷.

Dalam hal ini di kaitkan dengan teori kepemimpinan, setiap pemimpin islam selalu mengacu kepada semua metode di atas dalam mengambil suatu kebijakan maupun dalam menghadapi sebuah permasalahan. Mengacu pada beberapa metode dan pendekatan diatas yang menjadi dasar atau landasan berfikir dan bertindak seorang pemimpin dalam Islam lebih kepada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Sedangkan teori kepemimpinan sendiri berawal dengan tindakan seorang pemimpin yang meninggalkan catatan-catatan sejarah yang dibukukan. Maka teori kepemimpinan Siyasah merupakan sebuah tindakan seorang pemimpin Islam dalam hal ini semasa Rasulullah SAW., beserta penerusnya tentunya yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunah sebagai sebuah dasar dan meninjau dari tujuh metode pendekatan yang penulis paparkan diatas. Tentunya, sebagi penerus pemimpin Islam di kemudian hari, seorang pemimpin Islam dapat mencontoh apa yang telah di lakukan oleh pemimpin terdahulu. Seperti halnya pada masa Rasulullah membuat perjanjian di Madinah dengan seorang Kafir Qurais, memperlakukan non-muslim ketika memimpin Madinah dan lain Sebagainya.

³⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah-Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyiddin*, Cet-2, (bandung:CV. Pustaka Setia. 2008).h.

Jika berbicara mengenai sejarah mungkin yang patut menjadi contoh atau tauladan bagi kita ataupun bagi setiap pemimpin dalam memimpin masyarakat atau umat ialah Rasulullah SAW., Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai pemimpin Agama tetapi juga sebagai pemimpin Negara. Dengan sifat *amanah*, *fathonah*, *tablig*, *sidiq* beliau dan kemudian di teruskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin sebagai generasi estafet kepemimpinan umat islam selanjutnya.

Menengok kembali sejarah peradapan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW., sekilas kepemimpinan khulafa ar-rasyidin dianggap cocok dengan pembahasan ini. Kehalifahan Umar ibn al-Khaththab merupakan kalifah yang tegas dan kuat, bahkan setelah Umar di bai'at, sepeninggalan khalifah sebelumnya khalifah Abu Bakar, ia yang memperkenalkan istilah *Amir-al-Mu'minin* (komandan orang-orang yang beriman). Tidak hanya itu, sepuluh tahun masa pemerintahan Umar, gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi. Pada masa khalifah Umar perluasan daerah atau ekspansi terjadi dengan cepat dibarangi dengan pembentukan beberapa jawatan untuk membantu kelancaran administrasi dan oprasional tugas-tugas eksekutif di antaranya dewan *Al-Jund* (jawatan militer), dewan *Al-Addats* (jawatan kepolisian), dewan *Al-Kharraj* (jawatan pajak), *Bai'at Al-Mal* (lembaga pembendaharaan Negara) dan *Nazar Al-Nafiat* (jawatan pekerjaan umum). Kemudian Khalifah Utsman bi Affan pengganti Umar pun menarik untuk dikaji. Salah satu karia besar pada masa ini ialah di bukukannya

Mushaf Al-Qur'an dan perluasan masjid Nabi di Madinah. Generasi penerus kekhalifahan kemudian di berikan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan khalifah Ali ini tak semulus dengan khalifah-khalifah pendahulunya. Ia di bai'at ditengah masa-masa berkabung atas sepeninggalnya Ustman bin Affan. Khalifah Ali dikenal sebagai salah seorang yang pandai memainkan pedang dan pena, ia juga sebagai seorang orator³⁸

1. Kepemimpinan Rasulullah

Islam adalah Agama dan sudah sepantasnya jika didalam Negara di letakkan dasar-dasar Islam maka turunlah ayat-ayat Al-Qur'an pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi-sisi tersebut sebagaimana di jelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakannya. Hiduplah kota madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, ada solidaritas yang erat diantara anggota masyarakatnya. Dengan demikian, berarti bahwa ialah masyarakat islam pertama yang di bangun oleh Rasulullah dengan asas-asas yang abadi. Secara sistematis, proses peradapan yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat islam di Yatsrib adalah; *pertama* Nabi Muhammad mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah (*Madinat Ar-Rasul*, *Madinah An-Nabi*, atau *Madinah Al-Munawwarah*), perubahan nama yang bukan secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang

³⁸Dedi Supriyadi, *sejarah Peradapan Islam*, Cet-8 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h.

menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju dan berperadaban; *kedua*, yang membangun masjid. Masjid bukan hanya dijadikan pusat kegiatan ritual saja, tetapi juga menjadi sarana penting mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Disamping hal tersebut, masjid juga menjadi pusat kegiatan pemerintahan; *ketiga* Nabi membentuk kegiatan *Mu'akhat* (persaudara), yaitu mempersatukan kaum Muhajirin (orang-orang yang hijrah dari Mekkah ke Yatsrib) dengan Ansor (orang-orang yang menerima dan membantu kepindahan Muhajirin ke Yatsrib). Persaudaraan diharapkan dapat meningkatkan kaum muslimin dalam satu persaudaraan seagama, disamping satu persaudaraan yang sudah ada sebelumnya, yaitu satu bentuk persaudaraan berdasarkan darah; *keempat*, membentuk persaudaraan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam; dan *kelima*, Nabi Muhammad membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Bagian kelima inilah yang dianggap sangat penting, karena pada masa itu peradaban bangsa Arab yang masih mengagungkan hukum rimba. Yakni siapa yang kuat ia yang akan berkuasa. Maka dengan peperangan fisik mereka melakukannya demi tercapai tujuan tahta dan kekuasaan yang mereka inginkan..

Nabi Muhammad memang tidak menentukan bagaimana cara pergantian kepemimpinan setelah ditinggalkannya. Beliau tampaknya

menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang dikalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, proses suksesi kepemimpinan politik dalam sejarah Islam berbeda-beda dari satu masa kemasa yang lain. Ada yang berlangsung aman dan damai, tetapi sering juga melalui konflik dan pertumpahan darah akibat ambisi tak terkendali dari pihak-pihak tertentu. Setelah Nabi Muhammad wafat, tertaji pertentangan pendapat antara kaum Muhajirin dan Ansor di Bani Sa'adah di Madinah. Masing-masing golongan berpendapat bahwa kepemimpinan harus berada dipihak mereka, atau setidaknya masing-masing golongan mempunyai pemimpin sendiri. Akan tetapi, pemahaman keagamaan mereka yang baik, semangat musyawarah, ukhuwah yang tinggi, perbedaan itu dapat diselesaikan.

2. Kepemimpinan masa Khulafarushidin

a. Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq akan penulis jelaskan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

1) Bidang eksekutif

Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya untuk pemerintahan pusat menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan.

Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuk provinsi-provinsi, dan setiap provinsi ditunjuk seorang amir.

2) Pertahanan dan keamanan

Dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan tersebut disebar untuk mempertahankan stabilitas didalam maupun diluar negeri. Diantara panglima yang ada ialah Khalid bin walid, Musanna bin Harisah, Amr bin Ash, Zaid bin Sufyan, dan Lain-lain.

3) Yudikatif

Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khaththab dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berat untuk dipecahkan. Hal ini karena kemampuan dan sifst Umar sendiri, masyarakat [ada masa itu dikenal '*alim*.

4) Sosial ekonomi

Sebuah lembaga mirip Bait Al-Mal, di dalamnya dikelola harta dan benda yang didapat dari zakat, infaq, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai Negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan anturan yang ada.

b. Masa Khalifah Umar ibn Al-Khaththab

Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, khalifah Umar melengkapi beberapa dewan yang sudah terbentuk dengan menambahnya. Beberapa dewan yang dibentuk oleh khalifah Umar diantaranya:

- 1) Dewan *Al-Jund* (jawatan Militer)
- 2) Dewan *Al-Addts* (jawatan Kepolisian)
- 3) Dewan *Al-Kharraj* (jawatan Pajak)
- 4) *Bai 'at Al-Mal* (lembaga pembendaharaan Negara) dan
- 5) *Nazar Al-Nafiat* (jawatan pekerjaan umum)

Sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar, Khalifah Umar juga sangat cenderung menambahkan demokrasi secara intensif dikalangan rakyat, dikalangan para pemuka rakyat, dan dikalangan para pejabat atau para administrator pemerintah. Ia selalu mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah-masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dan memutuskan suatu urusan tanpa mengikutsertakan warga Negara, baik warga Negara muslim maupun warga Negara non-muslim.

Dalam masa kepemimpinan khalifah Umar lahir beberapa landasan hukum diantaranya:

Naskah asas-asas hukum acara

- 1) Kedudukan Lembaga keadilan
- 2) Memahami kasus persoalan baru memutuskan

- 3) Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adil
- 4) Kewajiban pembuktian
- 5) Lembaga damai
- 6) Penundaan sidang
- 7) Kebenaran dan keadilan adalah masalah universal
- 8) Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis
- 9) Orang Islam haruslah berlaku adil
- 10) Larangan bersidang ketika emosional³⁹

c. Masa Khalifah Utsman bin Affan

Setiap Amir atau gubernur adalah wakil khalifah di daerah untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintahan dan bertanggung jawab kepada khalifah. Seorang Amir diangkat dan diberhentikan oleh seorang khalifah. Khalifah Utsman sendiri yang mempercayakan gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Pada masanya wilayah kekuasaan Negara Madinah dibagi menjadi sepuluh provinsi, antar lain:

- 1) Nafi' bin Al-Haris Al-Khuza'i, Amir wilayah Mekah
- 2) Sufyan bin Abdulah Ats-Tsaqafi', Amir wilayah Thaif
- 3) Ya'la bin Munabbih Halif Bani naufal bin Abd Manaf, Amir wilayah Shan'a

³⁹*Ibid* Dedi Supriyadi, h. 83-84

- 4) Abdulah bin Abi Rabiah, Amir wilayah Al-Janad
- 5) Utsman bin Abi Al-Ash Tsaqafi, Amir wilayah Bahrain
- 6) Al-Mughirah bin syu'bah Ats Tsaqafi, Amir wilayah Kufah
- 7) Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, Amir wilayah Bashrah
- 8) Muawiyah bin Abi Sufyan, Amir wilayah Damaskus
- 9) Umar bin Sa'ad, Amir wilayah Himsh dan
- 10) Amr bin Al-Ash As-Sahami, Amir wilayah Mesir

Adapun kekuasaan legislative dipegang oleh dewan penasehat atau majelis Syura' tempat khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat Nabi terkemuka. Majelis ini memberikan saran, usul dan nasehat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi Negara. Akan tetapi, pengambilan keputusan terakhir berada ditangan khalifah. Artinya berbagai peraturan dan kebijaksanaan, diluar ketentuan Al-Qur'an dan Sunah Rasul, dibicarakan didalam majelis tersebut dan diputuskan oleh khalifah atas persetujuan anggota majelis. Dengan demikian majelis Syura' diketahui oleh khalifah.

Jadi jika Majelis Syura' ini disebut sebagai lembaga legislative, ia tidak sama dengan lembaga legislative yang dikenal sekarang yang memiliki ketua sendiri. Bagaimanapun dengan adanya Majelis Syura' telah ada pendelegasian kekuasaan dari khalifah untuk melahirkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan. Dari fungsi ini dapat dikatakan lembaga tersebut sebagai lembaga legislative untuk zamanya.

d. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Yang pertama dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib menarik kembali semua tanah yang telah dibagikan Khalifah Utsman kepada kaum kerabatnya kepada kepemilikan Negara dan mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, diantaranya Ibnu Amir penguasa Basrah, diganti Utsman bin hanif, Gubernur Mesir yang dijabat oleh Abdullah diganti oleh Qaya, Gubernur Suriah, Muawiyah juga diminta untuk meletakkan jabatan, tetapi menolak, bahkan ia tidak mengakui keKhalifahan Ali.

Pemerintahan Khalifah Ali dapat dikatakan pemerintahan yang tidak stabil karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan pertama diawali oleh penarikan bai'at oleh Thalhah dan Zubair, karena alasan bahwa Khalifah Ali tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Bahwa penolakan khalifah ini disampaikan kepada Siti Aisyah yang merupakan kerabatnya diperjalanan pulang dari Mekkah, yang tidak tahu mengenai kematian khalifah Utsman, sementara Thalhah dan Zubair untuk menentang khalifah Ali, karena alasan penolakan penghukuman pembunuh khalifah Utsman, bisa juga karena alasan pribadi, atau karena hasutan Abdullah bin Zubair. Muawiyah turut andil juga dalam pemberontakan ini, tetapi hanya terbatas pada usaha untuk menurunkan kredibilitas khalifah dimata

umat Islam. Dengan cara menuduh bahwa jangan-jangan khalifah berada dibalik pembunuhan khalifah Utsman.

Disamping penentang khalifah Ali memiliki pendukung yang sangat fanatic dan setia kepadanya. Dengan adanya oposisi terhadap Ali bin Abi Thalib, kesetian mereka kepada khalifah Ali sangat bertambah apalagi setelah khalifah Ali wafat dibunuh kalangan Khawarij. Mereka yang fanatic terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal dalam sejarah sebagai kelompok Syi'ah.

Dijelaskan pula dalam Fiqih Siyasah terdapat empat unsure yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain dari pada berpegang teguh dengan landasan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) ialah sebagai berikut:⁴⁰

1. Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan kepada Allah semata-mata dan semua umatnya wajib mengikuti Undang-undang-Nya ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* diantara orang-orang yang beriman selama *ulil amri* tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Diterangkan pada Qur'an Suran An-Nisa' ayat 59 (4) Allah berfirman

⁴⁰ *Op-Cit*, Beni ahmad Saebani, h.123-126

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taati Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri, (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian , jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa' Ayat 59:(4)).⁴¹

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasannya setiap rakyat memiliki persamaan hak didepan Undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' 58 (4) Allah berfirman.⁴²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

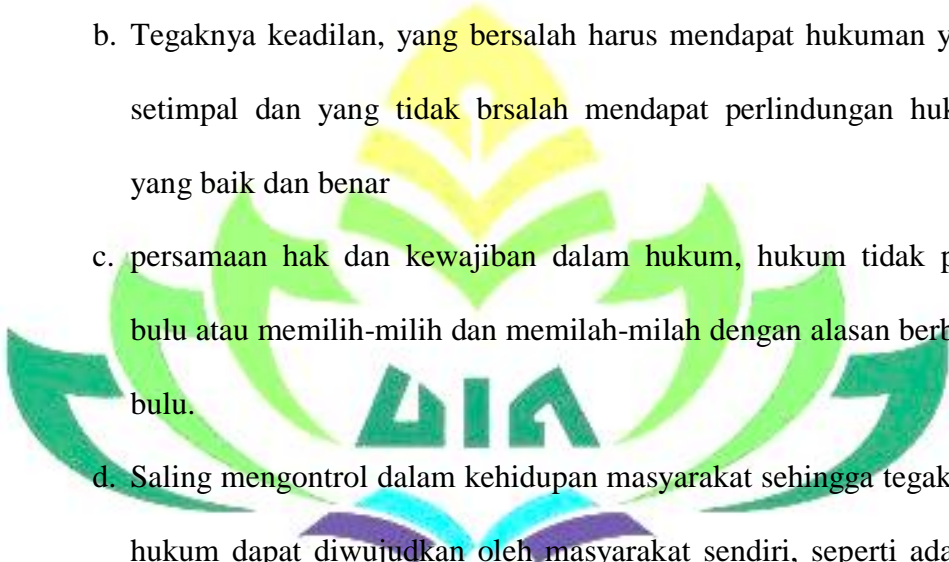
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Hukum yang mejadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat.

⁴¹ Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59:(4)

⁴² Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58 (4)

Cita-cita sosial yang bersandarkan pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keagamaan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itulah manusia mengharapkan hal-hal dibawah ini :

- 
- a. Kemaslahat hidup bagi diri dan orang lain
 - b. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar
 - c. persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-milah dengan alasan berbeda bulu.
 - d. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya sistem keamanan lingkungan (siskamling)
 - e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial
 - f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggungjawab terhadap masadepan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

3. Prinsip Persamaan (Musawah)

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 10 (49) Allah berfirman.⁴³

وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ يَبْنَ فَاَصْلِحُوا اِحْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ اِنَّمَا اللّٰهُ تَرْحُمُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Qur'an Surat Asy-Syura, Ayat 38 (42) Allah berfirman.⁴⁴

يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةُ وَأَقَامُوا رَبِّهِمْ اَسْتَجَابُوا لِلَّذِينَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.*

Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepetingan yang yang berbbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah

⁴³Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 10 (49)

⁴⁴Qur'an Surat Asy-Syura, Ayat 38 (42)

bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, namun sebaliknya yakni menjadi perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Beraskan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil di lakukan oleh pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lainnya di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas:⁴⁵

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam Negara hukum. Yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan , keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelengara pemerintahan Desa

⁴⁵Yusnani Hasyimzoem. Dkk , *Hukum Pemrintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2017), h. 132-133

- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Proporsionalitas; adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Akuntabilitas; adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang di laksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang di inginkan masyarakat Desa.
- i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten dan kota. Meskipun demikian, desa sebagai satuan pemerintahan terendah di berikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, selain itu desa juga memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Selanjutnya mengenai pengertian desa dapat di kemukakan pendapat sarjana maupun menurut peraturan perundang-undangan R.H. UnangSunardjo merumuskan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu di bubarkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam Pasal angka 1 menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang di sebut nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisonal

yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan desa mempunyai otonomi, akan tetapi otonomi desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintahan provinsi, kabupaten da kota, melainkan otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan.⁴⁶

Untuk mendapatkan pendapatan tambahanDesa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, yang di sebut BUM Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa biasanya berupa usaha ekonomi, dan penghasilannyapun bisa di manfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosila, dan kegiatan dana bergulir yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dana awal untuk pemberian BUM Desa itu sendiri berdumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi' Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dengan cara memberikan hibah, dan/atau akses pemodalan,

⁴⁶Josef Mario Monteiro, S.H., M.H. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2016) h. 121-122.

melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, serta memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

2. Perangkat Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di sistem pemerintahan Desa, yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 26 ayat (1) bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, selanjutnya dalam ayat (2) memiliki wewenang yaitu:

- 1) Memimpin, menyelenggarakan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) Membina rekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatis;
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau meninjau kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal (3) Kepala Desa memiliki hak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan yang lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang di laksanakan dan
- 5) Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kepala Desa juga berkewajiban sebagaimana yang di atur dalam ayat (4), yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan dan asset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Sedangkan dalam pasal 27 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan, tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

- 2) Menyampaikan laporan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- 3) Memberikan laporan keterangan penyelegaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggran; dan
- 4) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Selain memiliki tugas dan wewenang kepala desa juga di larang melakukan hal yang di atur dalam pasal 29, yaitu:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa;;
- 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya;
- 7) Menjadi pengurus partai poltik;
- 8) Menjadi anggita dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- 9) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 10) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- 11) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala desa dipilih melalui pemilihan secara langsung yang diatur dalam undang-undang tentang desa. Kepala Desa berhenti karena tiga hal yaitu; meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 40.⁴⁷

b. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Euforia masyarakat desa pascareformasi sangat memberikan pengaruh terhadap delegitimasi kekuasaan di Desa karena bangkitnya semangat kontrol masyarakat Desa terhadap pemerintahan Desa. Kekuasaan Kepala Desa yang tadinya Absolut dan sentralistik secara perlahan-lahan semakin dinamis oleh demokratisasi, sehingga membuatnya lebih hati-hati dan bertanggungjawab dalam mengolah kekuasaan Desa

⁴⁷ *Op-Cit* Yusnani Hasyimzoem. Dkk h.132-137

Kepala Desa di pilih langsung oleh penduduk desa dari calon Kepala Desa yang telah di tetapkan oleh panitia pemilihan. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus berdifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Pemilihan di laksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang di tentukan oleh panitia pemilihan.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur empat tugas utama kepala Desa yaitu :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
- b) Melaksanakan Pembangunan Desa,
- c) Melaksanakan Pembinaan Masyarakat, dan
- d) Memberdayakan Masyarakat Desa.

Dengan tugas yang di berikan, Kepala Desa di harapkan bisa membawa Desa kearah yang di harapkan.

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa mengatakan bahwa kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahann, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat administrasi kependudukan, dan penetapan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan

- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketatanegaraan.
- d) Pemberdayaan Masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

c. Sekretaris Desa

Pasal 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam administrasi Pemerintahan.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksud pada Ayat (2) sekretaris Desa mempunyai Fungsi

- a) Melaksanakan urusan Ketatausahaan seperti Tata Naskah, Administrasi Surat menyurat, Arsip, dan Ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan penegeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa menginventarisir data-data rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

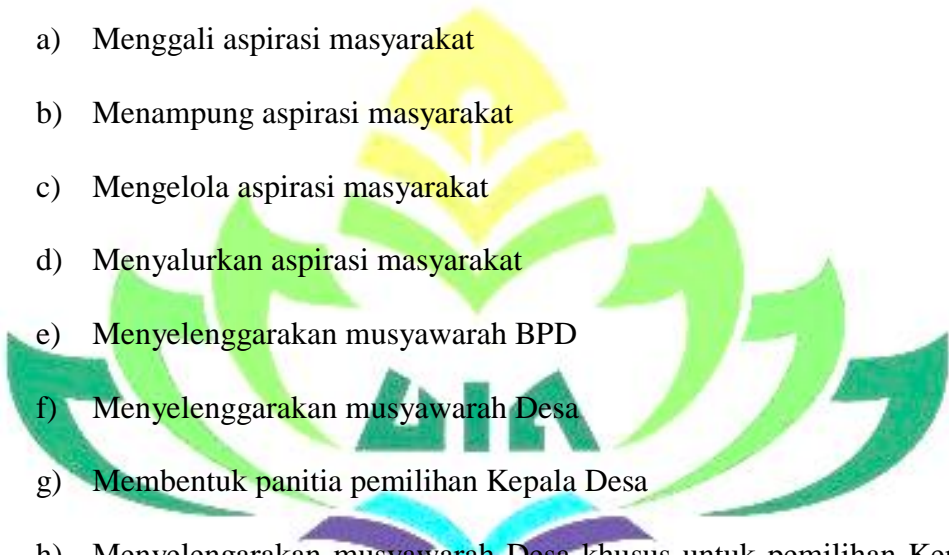
d. Badan Permusyawaratan Desa

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin di kuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah Undang-Undang Desa. Secara yuridis, Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang memlaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerjanya kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD di lakukan secara demokratis, yakni di pilih

dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No. 110/2016 Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas Badan Permasyarakatan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- 
- a) Menggali aspirasi masyarakat
 - b) Menampung aspirasi masyarakat
 - c) Mengelola aspirasi masyarakat
 - d) Menyalurkan aspirasi masyarakat
 - e) Menyenggarakan musyawarah BPD
 - f) Menyenggarakan musyawarah Desa
 - g) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - h) Menyenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
 - i) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
 - k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Dasar, Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Berdasarkan pasal 55 di tegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa di pilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak Sembilan orang.

Undang-undang desa bukan hanya mengatur hak dan kewajiban desa, tetapi juga hak dan kewajiban lembaga-lembaganya. Khusus mengenai hak dan kewajiban BPD, di atur dalam pasal 61-63 UU desa. Undang-undang ini membedakan hak kelembagaan PBD dan hak personal pengurus-pengurusnya serta kewajiban mereka.

Selanjutnya, dalam Pasal 61 diatur mengenai hak dari BPD, masih mengenai keterkaitan antran BPD dengan kepala desa, BPD juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a UU Desa yang berbunyi yaitu:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa;
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan berdasarkan Pasal 62 anggota BPD berhak:

- 1) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- 4) Memilih dan di pilih; dan
- 5) Dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Pasal 63 di tegaskan bahwa anggota BPD memiliki kewajiban, yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- 4) Mendahulukan kepentingan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- 5) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- 6) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam Pasal 64 anggota BPD dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- 2) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat desa;
- 3) Menyalahgunakan wewenang;
- 4) Melanggar sumpah/janji jabatan;
- 5) Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- 6) Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Sebagai pelaksana proyek desa;

- 8) Menjadi pengurus partai politi; dan/atau
- 9) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.⁴⁸

Berdasarkan pasal 48 perangkat Desa desa terdiri atas:

Pasal 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatakan bahwa:

Ayat (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam administrasi Pemerintahan.

Ayat (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksud pada Ayat (2) sekretaris Desa mempunyai Fungsi

- e) Melaksanakan urusan Ketatausahaan seperti Tata Naskah, Administrasi Surat menyurat, Arsip, dan Ekspedisi.
- f) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- g) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan penegeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

⁴⁸*Ibid.* Yusrani Hasyimzoem. Dkk h.138-140

- h) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa menginventarisir data-data rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

e. Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Adapun jumlah unsure kewilayahan di tentukan secara proposional. Artinya jumlah pelaksanaan kewilayahan yang dibutuhkan di sebuah desa selain memperhatikan kemampuan keuangan juga memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

f. Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan teknis atau di sebut nama lain adalah unsure pelaksana lapangan, sebagai pembantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara teknis di lapangan, bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah.

Perangkat desa memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 51 di tegaskan bahwa:

- 1) Merugikan kepentingan umum;
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya;
- 7) Menjadi pengurus partai politik;
- 8) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 10) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 11) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) Meninggalakan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.⁴⁹

D. Otonomi Desa

1. Pelaksanaan Otonomi Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan

⁴⁹*Ibid.* Yusnani Hasyimzoem. Dkk h.140-141

merupakan pemberian dari pemerintahan, sebaliknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang di miliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasar hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa di bentuk Badan Permasyarakatan

Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa Dengan Persetujuan Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman Desa, Kemudian berdasar hak atas usul Desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.⁵⁰

Namun harus selalu di ingat bahwa tiada hak tanpakewajiban, tiada kewenangan tanggungjawab, dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan Otonomi Desa jangan di lakukan secara kebablasan sehingga Desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi ataupun

⁵⁰HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003), h.165

dengan Pemerintahan Pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan Desa tanpa memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

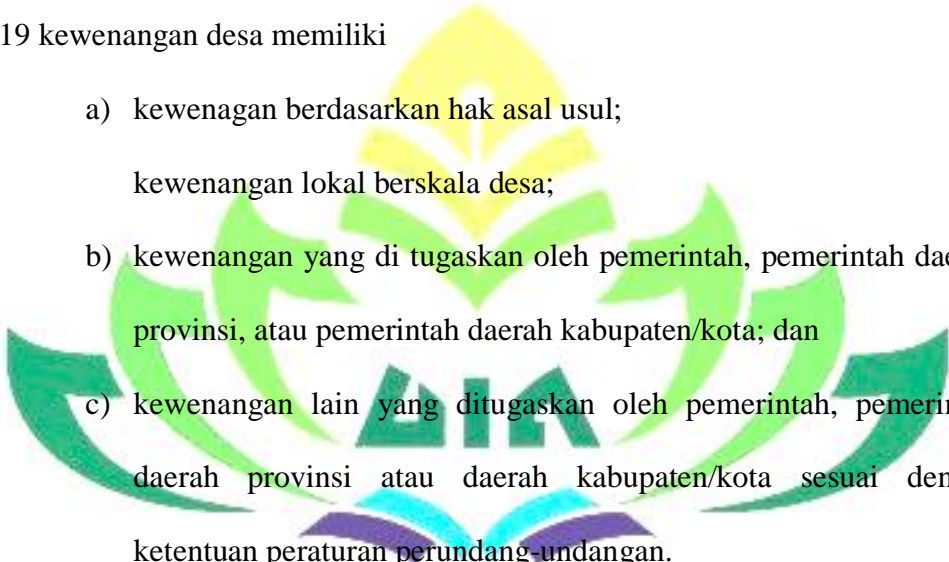
Pelaksanaan hak kewenangan dan kebebasan Otonomi Desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang di laksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu tujuan dari pelaksaaan Otonomi Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan yuridis tentang pradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa. Undang-Undang Desa mendapatkan posisi Desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, menegdepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa. Undang-Undang Desa mempertegas kewenanagan otonom melalui kebijakan penataan Desa. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat

setempat. Desa di dorong sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, demokratis dan kuat namun dalam kerangka perlindungan pemberdayaan Negara.⁵¹

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 kewenangan desa memiliki

- 
- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
kewenangan lokal berskala desa;
 - b) kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan ke dalam dua hal yaitu:

- a) kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan dan sebagainya;
- b) kebutuhan pembangunan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industry dan sebagainya;.

⁵¹Bambang Suryadi. *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa, cetakan pertama*, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016. h.3

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Desa

a) Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan Otonomi Desa adalah rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Rendahnya kelembagaan Desa, lemahnya perencanaan dan kurangnya sarana dan prasarana Desa maupun mengenyam pendidikan. Secara umum Pelaksanaan Otonomi Desa belum berjalan dengan optimal karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Faktor Pendukung

Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Otonomi Desa adalah faktor Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa didanai dari atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

BAB III

PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA NEGERI CAMPANG JAYA KEC. SUNKAI TENGAH KAB. LAMPUNG UTARA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Desa yang memiliki letak yang tidak jauh dari Ibukota Kecamatan. Letak dari Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah ini tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Lampung Utara.

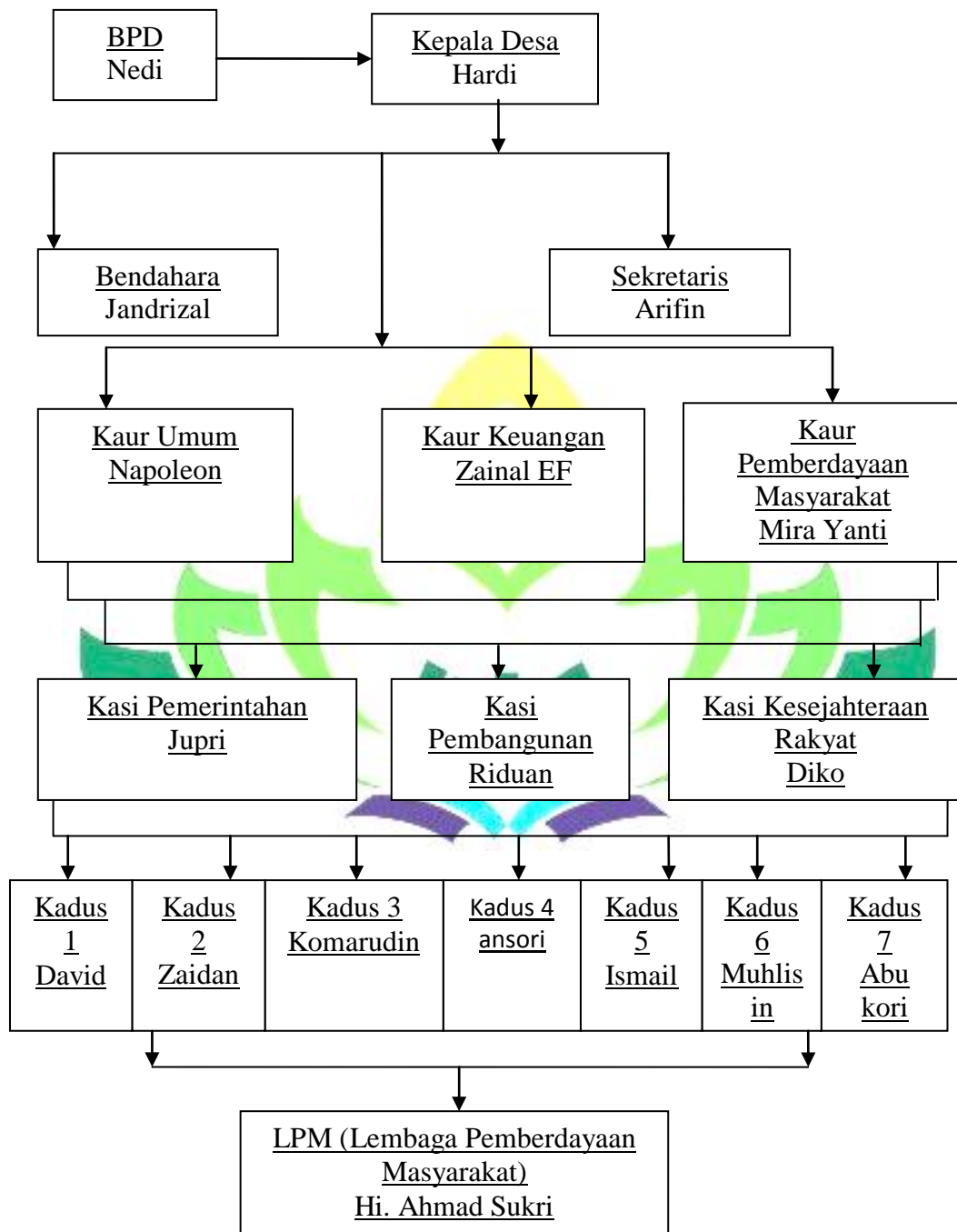
Adapun batas-batas wilayah Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pampang Tangguk Jaya
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Negeri Batin Jaya
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Negeri Galih Rejo
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakuan Batu

2. Keadaan Demografis

Desa Negeri Campang dihuni oleh berbagai suku seperti: Lampung, Jawa, dan suku lainnya. Penduduk Desa Negeri Campang Jaya berjumlah 3,182 jiwa, kaum laki-laki 1,564 jiwa dan 1,618 jiwa kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Negeri Campang Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DESA NEGERI CAMPANG JAYA
KEC. SUNKAI TENGAH
KAB. LAMPUNG UTARA



TABEL. I.1
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
 Jumlah Penduduk

No	Jenis Klamín	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	1,564
2	Perempuan	1,618
	Jumlah	3,182

Sumber data : Kantor Kepala Desa Negeri Campang jaya

Dari tabel di atas dapat di lihat jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih berapa saja. Laki-laki yang berjumlah 1,564 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1,618 jiwa.⁵²

Kemudian jika dilihat dari luas wilayah Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah kabupaten Lampung Utara dpat di lihat lebih jelas pada table di bawah ini:

TABEL I.2
LUAS WILAYAH DESA NEGERI CAMPANG JAYA
 Luas Wilayah

Luas wilayah	3500.00Ha
Perkebunan	1.804.00Ha
Bangunan umum	16.00Ha
Sawah	10.00Ha

Sumber data: Kantor Desa Negeri Campang Jaya

3. Sarana dan Prasarana Desa

1) Agama dan pedidikan

Masyarakat Desa Negeri Campang Jaya keseluruhan menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut di luar agama

⁵²Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Sekertaris Desa Negeri Campang Jaya Tanggal, 16 Mei 2018, jam 10.00 WIB di Kantor Desa Negeri Campang Jaya

Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang di yakini dan di jadikan pedoman hidup masyarakat Desa Negeri Campang Jaya, masyarakat setempat menjadikan agama Islam sebagai Nilai yang paling tinggi.

Jika di lihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan masyarakat umat Islam di Desa Negeri Campang Jaya dapat di katakan cukup memadai.⁵³

TABEL I.3
JUMLAH SARANA IBADAH

Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Masjid	Mushallah	Gereja
1	Dusun I Negara Jaya	—	2	—
2	Dusun II Campang Jaya	1	2	—
3	Dusun III Batu Balak	1	2	—
4	Dusun IV Sandung Jaya	—	1	—
5	Dusun V Batu Ampar	—	1	—
6	Dusun VI Suka Jaya	—	1	—
7	Dusun VII Durian Nunggal	—	1	—
	Jumlah	2	10	—

Sumber : Kantor Kepala Desa Negeri Campang Jaya

⁵³Wawancara dengan Bapak Hirlan Musa selaku Tokoh Agama di Desa Negeri Campang Jaya Tanggal, 16 Mei 2018, jam 15.35 WIB, di rumah kediaman Bapak Musa di Desa Negeri Campang Jaya.

TABEL I.4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	3
3	MI	1
4	MTS	1
5	SMA	1
6	PONDOK	1
	Jumlah	8

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Negeri Campang Jaya

2) Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Mata pencharian utama masyarakat Desa Negeri Campang Jaya adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang di lakukan oleh masyarakat Desa Negeri Campang Jaya adalah jenis usaha karet, kelapa sawit, singkong jagung sawah perkebunana dan sayur-sayuran. Di samping itu ada sebagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan seperti, melakukan usaha perdagangan dan pengolahan kayu dan peternakan. Potensi pengembangan ekonomi Desa Negeri Campang Jaya adalah pengembangan Usaha singkong dan jagung. Selain dari itu masayarakat Desa juga memiliki usaha tani sayur-sayuran.

Masyarakat Desa Negeri Campang Jaya menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang menganut tata pergaulan sosial dalam masyarakat Desa. Masyarakat Desa juga menganut Tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan adat pernikahan, masyarakat Desa juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat Desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan Desa dalam membangun Desa.

Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan control sosial yang utama, melainkan konsep agama Islam sebagai pedoman utama mereka. Sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan sara', sara' bersendikan Kitabullah.⁵⁴

3) Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Negeri Campang Jaya, kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Negeri Campang Jaya sudah rata-rata di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sarana transportasi di Desa Negeri Campang Jaya menggunakan sarana transportasi yakni, kendaraan motor, mobil pekap, truk yang berpropesi setiap harinya, dalam keseharian kendaraan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat digunakan untuk mengangkut barang dagangan dan hasil panen masyarakat desa.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Andi Gunadi selaku Tokoh Masyarakat di Desa Negeri Campang Tanggal, 17 Mei 2018, jam 9.30 WIB di Rumah kediaman Bapak Andi Gunadi Desa Negeri Campang Jaya.

Sarana komunikasi di Desa Negeri Campang Jaya sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh, masyarakat juga dapat menerima berbagai informasi dan berita-berita lainnya melalui televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.⁵⁵

B. Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya

Desa Negeri Campang Jaya salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sungkai Tengah di bawah kekuasaan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya melaksanakan dan menjalankan kebijakan serta keputusan dari pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan Desa juga berkerjasama dengan (BPD), sebulan sekali mereka mengadakan pertemuan untuk membahas tentang rencana pembangunan Desa dengan para tokoh masyarakat dan juga dengan masyarakat luas⁵⁶. Dalam periode pertemuan ini sering dilakukan di rumah kepala Desa atau salah seorang dari perangkat Desa. Pertemuan ini memang jarang di kantor Desa karena merasa jika diadakan di rumah, suasana kekeluargaan terasa lebih kental dari pada mengadakan pertemuan di kantor Desa karena hal tersebut terkesan lebih formal.

Setiap tindakan yang akan diambil oleh Kepala Desa akan selalu dimusyawarahkan melalui komunikasi internal terlebih dahulu sekurang-kurangnya

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Umasin Selaku Masyarakat Desa di Desa Negeri Campang Jaya, Tanggal 17 Mei 2018, jam 16.15 WIB di Rumah kediaman Bapak Umasin di Desa Negeri Campang Jaya.

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Marzuki Yahya Selaku Masyarakat Desa di Desa Negeri Campang Jaya, Tanggal 18 Mei 2018, jam 16.00 WIB di Rumah kediaman Bapak Marzuki Yahya di Desa Negeri Campang Jaya.

dengan ketua BPD. Begitu pula dengan kebijaksanaan yang akan diambil oleh BPD, selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Dalam hal penggunaan APBDes, aparatur Desa selalu melakukan pencatatan tertulis. Setiap penerimaan atau pengeluaran kas Desa selalu di tulis dalam buku kas masuk dan kas keluar. Pencatatan ini di lakukan oleh bendahara Desa yang di tunjuk melalui kesepakatan semua warga Desa Negeri Campang Jaya.⁵⁷

Laporan tentang keuangan Desa akan di sampaikan kepada BPD setiap satu semester, namun setiap akhir bulan selalu di laporkan kepada masyarakat melalui laporan pada papan pengumuman atau papan informasi yang terletak di Kantor Desa. Laporan tersebut di lampirkan secara rinci tentang berapa penerimaan yang di terima Desa Negeri Campang Jaya sebagai sumber dan berapa pengeluaran dana untuk berbagai keperluan Desa.⁵⁸

Dalam hal penerimaan bantuan desa, aparatur Desa melakukan identifikasi terhadap bantuan yang di terima guna dapat menyalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang di terima masyarakat seperti bantuan bibit jagung untuk masyarakat petani.⁵⁹ Selain itu tidak semua petani berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena di prioritaskan kepada petani yang mempunyai lahan yang sudah di olah.

Pelaksanaan Otonomi Desa seperti yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pelaksanaan otonomi desa adalah untuk membiayai

⁵⁷Wawancara dengan Jandrizal Selaku Bendahara Desa di Desa Negeri Campang Jaya, Tanggal 18 Mei 2018, jam 13.30 WIB di Kantor Desa, Desa Negeri Campang Jaya.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Hardi Selaku Kepala Desa di Desa Negeri Campang Jaya, Tanggal 19 Mei 2018, jam 15.15 WIB di Kantor Desa, Desa Negeri Campang Jaya.

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Mukim Abari Selaku Anggota BUMDes di Desa Negeri Campang Jaya, Tanggal 19 Mei 2018, jam 09.15 WIB di Rumah kediaman Bapak Mukim Abari di Desa Negeri Campang Jaya.

pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), dan sarana sosial (seperti klinik) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa. khususnya di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah.

Dalam kurun waktu 2017 pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya sudah berhasil mengembangkan dana desa atau menggunakan dana desa secara efisien yaitu sudah adanya pembentukan BUMDes, dengan adanya BUMDes sehingga petani lebih bisa memilih bibit unggulan seperti bibit jagung, perbaikan jalan, gorong-gorong pasar, pos keamanan irigasi, bendungan kursi milik desa dan di akhir 2017 pun sudah terbangun kantor desa yang baru. Namun yang belum terlihat adalah belum terbentuknya koperasi dana desa.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Otonomi Desa pada Pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya melalui berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya mengenai penyelenggaraan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah tersebut. Hal ini penulis lakukan dengan melakukan berbagai pertanyaan atau wawancara kepada Kepala Desa atau perangkat Desa, ketua BPD Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh dan masyarakat Desa lainnya.

BAB IV

PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN

OTONOMI DESA DI DESA NEGERI CAMPANG JAYA

A. Pelaksanaan Otonomi Desa Pada Pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi tujuan pelaksanaan otonomi desa itu sendiri adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), dan sarana sosial (seperti klinik) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa. Undang-Undang Desa mendapatkan posisi desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Undang-Undang desa mempertegas kewenangan otonomi melalui kebijakan penataan desa.

Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa di dorong sebagai identitas pemerintahan

yang mandiri, demokratis dan kuat dalam kerangka perlindungan pemberdayaan Negara.

Pelaksanaan otonomi desa yang terjadi pada Pemerintahan desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah terlaksana dengan baik namun jika kita lihat dari segi meningkatkan kemajuan sarana ekonomi belum berjalan. Memang sudah ada sebagian yang sudah terealisasi akan tetapi masih saja ada yang belum terlaksana seperti sarana sosial yaitu, klinik belum ada, pada desa sehingga mengakibatkan masyarakat desa susah dalam mengakses kesehatan karena masih kurang nya prasarana desa seperti puskesmas atau klinik tersebut sedangkan yang ada dalam Undang-Undang otonomi desa itu salah satunya adalah untuk meningkatkan sarana sosial seperti pusat kesehatan atau klinik, namun pada kenyataan pemerintahan desa Negeri Campang Jaya masih kurang efisien dalam bidang sarana sosial pada desa. Di desa ini ada bidan yang mengadakan praktek akan tetapi itu bukanlah merupakan bidan desa yang ditetapkan oleh pemerintahan desa hanya sekedar membuka praktek di rumah pribadi dan bukan di puskesmas atau klinik ini karena belum adanya pusat kesehatan atau sarana sosial itu sendiri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya juga berkerjasama dengan (BPD), dengan para tokoh masyarakat dan juga dengan masyarakat luas. Dalam periode sebulan sekali mereka mengadakan pertemuan untuk membahas tentang rencana pembangunan desa. Pertemuan ini sering dilakukan di rumah kepala Desa atau salah seorang dari perangkat desa. Pertemuan ini memang jarang di kantor Desa karena merasa jika diadakan di

rumah, suasana kekeluargaan terasa lebih kental dari pada mengadakan pertemuan di kantor desa karena hal tersebut terkesan lebih formal.

Setiap tindakan yang akan di ambil oleh Kepala Desa akan selalu di musyawarahkan melalui komunikasi internal terlebih dahulu sekurang-kurangnya dengan ketua BPD. Begitu pula dengan kebijaksanaan yang akan diambil oleh BPD, selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa

Dalam hal penerimaan bantuan desa, aparatur Desa melakukan identifikasi terhadap bantuan yang di terima guna dapat menyalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.bantuan yang di terima masyarakat seperti bantuan bibit jagung untuk masyarakat petani.Selain itu tidak semua petani berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena di prioritaskan kepada petani yang mempunyai lahan yang sudah di olah.

B. Pandangan Fiqih Siyah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya

Desa Negeri Campang Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sungkai Tengah yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara.Menurut pola kerja pemerintahannya ialah pemerintahan yang bersifat hirarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah tersebut.

Dalam Negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam Prinsip tersebut adalah prinsip

tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia, dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.

Masyarakat di Desa Negeri Campang Jaya adalah masyarakat yang pada umumnya beragama Islam. Dalam Islam tidak diatur secara rinci bagaimana hidup dalam bernegara dan bermasyarakat. Pedoman dasar tersebut juga menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip Desa Negeri Campang Jaya dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, masyarakat Desa Negeri Campang Jaya juga sangat memegang teguh prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

Sebenarnya dalam pemerintahan, sistem dan bentuk yang di pakai oleh suatu pemerintahan tidak menjadi hal yang utama, tetapi yang utama adalah bagaimana pelaksanaan dari sistem pemerintahan itu dapat memberikan kemaslahatan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan lainnya.

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan Negara yang mempunyai kekuasaan umum berada di tingkat yang paling bawah. Dan miniatur pemerintahan Negara, hanya saja kedudukannya menyerupai kadhi, kalau di lihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun dari pandangan kerjanya pemerintahan desa lebih khusus karena kekuasaannya terbatas pada bagian atau daerah kecil. Dilihat dari kepentingannya, kekuasaan ini di pandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi yaitu adanya penunjukan langsung oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pemerintahan daerah) dan

tidak mempunyai hak istimewa yang mencerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogative tertentu dalam kekuasaan kepemimpinan umum begitu juga eksistensinya.

Dari uraian di atas dapat diketahui Islam tidak mengatur dan menentukan secara eksplisit tentang bentuk pemerintahan suatu Negara, daerah atau wilayah. Tetapi Islam hanya memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu Negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat.

Dalam siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pelaksanaan otonomi desa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya pada hal-hal tertentu seperti; dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, berdasarkan penelitian yang didapatkan bahwa pelaksanaan otonomi desa tersebut sudah disalurkan dengan cukup baik kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ini berarti bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Kepala Desa beserta perangkatnya sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertian pada Konsep Fiqih Siyasah.

Di antara tugas dan kewajiban pemerintahan Desa Negeri campang Jaya juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam Fiqih Siyah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparturnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Negeri Campang Jaya. Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat, di Desa Negara Campang Jaya sudah di laksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam bantuan yang telah di berikan oleh pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya seperti bibit unggul pertanian.

Dalam menjalankan pemeritahan aparaturnya Desa Negeri Campang Jaya harus mempunyai kekuatan dan charisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, (16)

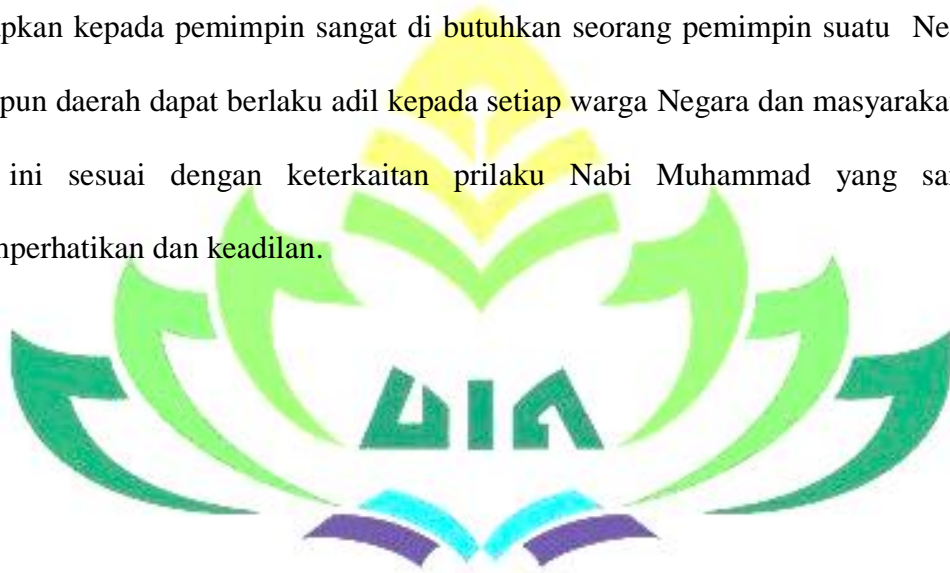
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَايَ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ

تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. (Qs. An-Nahl:90, (16)).⁶⁰

Nabi Muhammad tumbuh dewasa dalam sebuah masyarakat yang di landa ketidak adilan dan penindasan, dan oleh karena itu, beliau sangat memperhatikan masalah keadilan. Penyelamatan Islam berarti menegakkan ketertiban, tatanan, dan keselarasan yang di dalamnya standar keadilan Ilahiah. Oleh karena itu di harapkan kepada pemimpin sangat di butuhkan seorang pemimpin suatu Negara ataupun daerah dapat berlaku adil kepada setiap warga Negara dan masyarakatnya hal ini sesuai dengan keterkaitan perilaku Nabi Muhammad yang sangat memperhatikan dan keadilan.



⁶⁰Qur'an Surat An-Nahl Ayat:90 (16)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahsan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomidesa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerja sama antar aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Seperti pembangunan infrastruktur di desa sudah terlaksana diantaranya perbaiki jalan, perbaiki gorong-gorong, pembuatan bendungan adanya saluran air bersih, kantor desa dan sarana desa lainnya. Adanya pasar di desa untuk memudahkan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama halnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yaitu di bentuknya BUMDes dan di salurkannya bibit unggul bantuan seperti bibit jagung. Namun dalam mengakses kesehatan di Desa Negeri Campang Jaya masih mengalami kesulitan itu di karenakan belum adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan yang sangat di butuhkan dalam desa dengan tujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat desa.
2. Pelaksanaan pemerintahan pada Desa Negeri Campang Jaya belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada Konsep Fiqih Siyasah Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat pada

kepentingan masyarakat desa yang sangat membutuhkan sarana sosial (klinik) pusat kesehatan, yang masih menjadi keterkurangan di dalam masyarakat desa, sehingga menyulitkan masyarakat desa dalam mengakses kesehatan. Karena ini berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan masyarakat desa pemerintahan desa seharusnya lebih memperhatikan kesehatan, keselamatan masyarakat desa, pada umumnya sudah menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mengutamakan kemaslahatan masyarakatnya.

B. Saran

1. Sebaiknya aparat pemerintah Desa Negeri Campang Jaya harus lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat desa dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di desa supaya dapat membangun potensi masyarakat desayang lebih baik dan pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negeri Campang Jaya dapat berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa sebagaimana mestinya yang telah menjadi tujuan dari Undang-Undang Otonomi Desa Nomor 6 Tahun 2014 yaitu untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), dan sarana sosial (seperti klinik) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa.

2. Seharusnya perangkat pemerintahan pada Desa Negeri Campang Jaya dalam menyelenggarakan pelaksanaan otonomi desa harus berdasar pada prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqih Siyasah Islam, supaya masyarakat desa dapat hidup dengan tentram aman dan damai dan memiliki pemimpin yang berkeadilan dan tanpa membedakan-bedakan golongan masyarakat tertentu.



DAFTAR FUSTAKA

Al-Ahkam, *Shahih Bukhari Muslim : Hadist yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.*

Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim : Hadist yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*, Cet, 1; Bandung: Jabal, 2008

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Sulthaniyah- Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta:Qisthi Pers, 2015

Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah-Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyiddin*, Cet-2, bandung:CV. Pustaka Setia. 2008

Dedi Supriyadi, *sejarah Peradapan Islam*, Cet-8 Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997

Farid Abdul Khariq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta : Dar Asy-Syuruq 1419/1998

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003

-----*fiqhSiyasah*, Prenada Media, Jakarta. 2000

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh* Jakarta : PT Raja Granfindo Persada, 2003

Yusnani Hasyimzoem, Dkk ,*Hukum Pemrintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga Jakarta, 2008

Iqbal Hasan, *Pokok-poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Josef Mario Monteiro *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2016

Juliansyah, *Metode Penelitian* Jakarta :Kencana, 2010

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta :Paradigma, 2005

Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah* Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan, 2014

M. dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers., 2001

Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian*, Jakarta :Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rieneka Cipta 2006

Soerjino soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta :Universitas Indonesia Press, 1986

Dr. Hj. Zuhraeni. SH.,MH, *Hukum Pemerintahan Desa*, Fakultas Syariah IAIN RadenIntan Lampung:2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang Nomor 22 Tahun 2015 revisi atas Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 Perubahan ke dua Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3.